

Journals of Economics Development Issues (JEDI)

URL: <http://JEDI.upnjatim.ac.id/index.php/JEDI>

**KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: PERBANDINGAN  
NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA (*THE LOCAL GOVERNMENT  
FINANCIAL PERFORMANCE: SOUTHEAST ASIA COUNTRIES  
COMPARISON*)**

Sumini  
Shinta Permata Sari  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jalan A Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta-57102  
email: [Shinta.Sari@ums.ac.id](mailto:Shinta.Sari@ums.ac.id)

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRACT

*Article history:*  
Dikirim tanggal: 11 September 2019

Tersedia online tanggal: 17  
September 2019

**Keywords** : *financial performance, local government revenue and expenditure, southeast-asia countries.*

*New public management give good influences on better local financial governance at many countries worldwide. It led the central government to develop their local improvement by giving transfer from upper to lower governments. This study identifies the financial performance across southeast-asia countries: Indonesia, Malaysia, Thailand, and Philippines. Southeast-asia countries are taken as the sample because the countries at this region have some similarities in government activities. Local government revenues and expenditures of each country are used as the indicator of financial performance. The data is analyzed using analysis of variance. Results show that there are no differences of financial performance within southeast-asia countries. That result indicate the four countries at southeast-asia region: Indonesia, Malaysia, Thailand, and Philippines are able to perform their good governance for their citizen.*

## PENDAHULUAN

Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari akuntabilitas (Bastian: 2010). Akuntabilitas publik dapat diukur dengan menggunakan rasio analisis kinerja keuangan. Menurut Mardiasmo, (2002: 169) Penggunaan rasio analisis kinerja keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan.

Analisis kinerja keuangan merupakan petunjuk untuk perbaikan kinerja pemerintah di masa yang akan datang, menunjukkan arah perolehan target kinerja yang telah ditentukan, megawasi serta mengevaluasi kinerja, dan membantu mengutarakan dan memecahkan masalah yang ada. Pedoman tersebut menjamin terselenggaranya *good government*, sebagai salah satu kualifikasi bagi pemerintah dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia sejak tahun 1999 telah menerapkan kebijakan yang dinilai dapat mempermudah untuk membantu mewujudkan cita-cita bangsa untuk menyusun perbaikan sosial ekonomi dan kemandirian ekonomi tingkat lokal, kebijakan tersebut disebut otonomi daerah atau desentralisasi. Menurut Halim dan Kusufi (2012) otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan hanya di Indonesia Indonesia, negara-negara tetangga yang terletak pada satu kawasan, seperti Malaysia, Filipina dan Thailand juga menerapkan sistem desentralisasi. Berawal dari bergabungnya negara-negara dikawasan Asia Tenggara dalam organisasi dan kerjasama geopolitik dan ekonomi yang disebut ASEAN. Dalam Organisasi konferensi ASEAN ada pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara

anggota ASEAN yang disebut dengan Konferensi Tingkat Tinggi dalam hubungannya atas perluasan ekonomi dan budaya antar negara-negara Asia Tenggara. Asosiasi ini dibentuk dalam rangka kerja sama dibidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, pendidikan dan bidang-bidang lain selain juga untuk menciptakan keamanan dan kestabilan regional (Khoman, 1992). Sejak dibentuknya ASEAN, KTT telah melakukan 33 kali pertemuan resmi, salah satu pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kebijakan dibidang ekonomi yang berlaku untuk negara-negara Asia Tenggara tepatnya pertemuan yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 7-8 Oktober 2003. Dari hasil pertemuan tersebut lahirlah sebuah kebijakan yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai sistem perekonomian yang mengikut sertakan kerja sama antar negara-negara ASEAN. Sistem ini menyebabkan adanya pola perdagangan lebih bebas di antara negara-negara anggota ASEAN.

Perdagangan yang lebih bebas di suatu kawasan salah satunya secara umum meletakkan perdagangan kawasan ke dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena dalam perdagangan internasional tercipta persaingan di pasar internasional (Mutia, 2012). Situasi seperti itu merombak susunan perekonomian dan perdagangan dunia dan berakibat pada setiap negara yang menggunakan kebijakan perdagangan bebas atau ekonomi terbuka, akibatnya memicu semua negara di belahan dunia termasuk Indonesia untuk mengadakan kerja sama dengan luar negeri. Akibat dari adanya kerjasama tersebut, negara satu dengan yang lain saling mempelajari sistem perekonomian negara lainnya. Kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan perbaikan lokal menjadi bagian dari perhatian setiap negara dengan memberikan transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Kondisi tersebut juga diimplementasikan di beberapa negara ASEAN seperti, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.

Laporan keuangan dapat menyajikan kualitas dalam manajemen keuangan pemerintah. Dengan mengamati pengungkapan laporan keuangan, pengguna dapat mengetahui beberapa informasi penting mengenai bagaimana pemerintah mengelola negara, terutama seberapa baik akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan.

Laporan keuangan biasanya mengikuti standar akuntansi tertentu. Secara umum, semua negara ASEAN menerbitkan laporan keuangan pemerintah dan memiliki standar akuntansi yang unik. Akan tetapi, *International Federation of Accountants* (IFAC), melalui *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) telah menyusun *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) sebagai referensi internasional dalam standar akuntansi pemerintahan (Sukmadilaga, *et al.*, 2015).

Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina merupakan negara-negara di Asia Tenggara yang menerapkan desentralisasi pada sistem pemerintahannya, tampak negara-negara tersebut sudah sedari lama memulai usaha-usaha memajukan fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan daerah dengan mengikut sertakan pemerintah daerah, partisipasi penduduk lokal dan sektor swasta. Ketiga unsur tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam era desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Kondisi keuangan pemerintah sangat penting untuk diketahui dan diperhatikan, karena pemerintah merupakan penyedia utama yang memberikan layanan langsung kepada publik termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kondisi keuangan pemerintah yang baik menjamin keberlanjutan pemerintah dalam memberikan layanan pada kualitas yang sesuai. Selain itu, kondisi keuangan pemerintah yang baik tidak hanya berdampak langsung pada masyarakat lokal, tetapi juga memainkan peran penting dalam perekonomian (Rintonga, *et al.*, 2012).

Pengukuran kinerja bagi kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan mengembalikan kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu juga dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio (Bastian, 2010), seperti rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio efisiensi, rasio kontribusi pendapatan asli daerah, rasio hutang terhadap pendapatan, dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan amat penting dilaksanakan sebab dapat digunakan sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa yang akan

datang, menunjukkan arah perolehan target kinerja yang telah ditentukan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja, membantu mengungkapkan dan menyelesaikan masalah yang ada. Terselenggaranya *good governance* adalah salah satu persyaratan bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Pertanggungjawaban kepada publik adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan guna melaksanakannya diperlukan media tertentu. Salah satu alat yang digunakan untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Perkembangan pelaporan keuangan pemerintah daerah di negara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah negara-negara di kawasan Asia Tenggara penelitian ini menggunakan analisis rasio, dengan melakukan perbandingan rasio kinerja keuangan antar pemerintah daerah secara lebih luas sehingga memberikan gambaran umum tentang keseriusan pemerintah daerah di kawasan Asia Tenggara untuk mewujudkan *good government* dalam pemberian layanan publik. Pada akhirnya, kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik akan menunjang perkembangan kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang menarik untuk pengembangan kapital bagi berbagai pihak karena dukungan layanan publik yang optimal.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya (Poyoh, *et al.*, 2017). Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998). Pengukuran kinerja pemerintah daerah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik yang optimal kepada masyarakat.

### **Efisiensi**

Bastian (2010) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai prestasi yang dicapai oleh

organisasi dalam periode tertentu. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut (Sumarjo, 2010). Menurut Sestyningtyas (2012) pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi yaitu dengan pembelanjaan secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik. Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan melakukan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan (Mahmudi, 2010). Efisiensi dapat ditinjau dengan membandingkan besarnya belanja yang dikeluarkan dengan penghasilan yang didapat. Semakin tinggi rasio efisiensi pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mampu mengelola belanja daerahnya sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah.

**H<sub>01</sub>** : Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara ditinjau dari kemampuan efisiensi.

### **Kontribusi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan aset kepunyaan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah dapat menggali potensi riil di daerahnya masing-masing untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli dari setiap daerah dapat diperoleh dari hasil dari penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, komisi, potongan pendapatan denda atas keterlambatan melaksanakan pekerjaan serta pendapatan denda pajak dan denda retribusi (Mahmud, *et al.*, 2014). Analisis kontribusi pendapat asli daerah dapat dipakai untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan daerah yang diutamakan dari pajak daerah terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (Fitra, 2015).

**H<sub>02</sub>** : Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara ditinjau dari kontribusi pendapatan asli daerah.

### **Kemampuan Hutang terhadap Pendapatan**

Kewajiban pemerintah daerah berupa hutang kepada pihak lain, pada akhirnya akan menjadi beban bagi masyarakat apabila pemerintah daerah tidak mampu menutup hutang tersebut (Mahmudi, 2010). Rasio utang terhadap

pendapatan (*debt to income ratio*) merupakan ukuran pembayaran hutang pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah pendapatan yang didapatkan. Pada umumnya, kemampuan pelunasan hutang berdasarkan pendapatan tersebut akan mempengaruhi pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) untuk menentukan kelayakan pemberian pinjaman.

**H<sub>03</sub>** : Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara ditinjau dari kemampuan hutang terhadap pendapatan.

### **Kemampuan Belanja Modal terhadap Total Belanja**

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja. Analisis ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi 2010: 164). Belanja modal pada umumnya digunakan untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung layanan publik pemerintah daerah. Apabila belanja modal menunjukkan proporsi yang besar, maka pemerintah daerah cenderung berorientasi terhadap penyiapan infrastruktur daerah pada periode anggaran yang bersangkutan.

**H<sub>04</sub>** : Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara ditinjau dari kemampuan belanja modal terhadap total belanja

### **Kemampuan Belanja Langsung terhadap Total Belanja**

Menurut Mahmudi (2010) analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, dalam hal pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Belanja langsung merupakan belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan (aktivitas) pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik, sebaliknya belanja tidak langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Seharusnya belanja langsung memiliki nilai lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung amat mempengaruhi output kegiatan pemerintah daerah.

**H<sub>05</sub>** : Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara ditinjau dari kemampuan belanja langsung terhadap total belanja.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Populasi, Sampel dan Data Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi rasio keuangan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini populasinya adalah pemerintah daerah pada negara-negara di Asia Tenggara yang menerapkan sistem desentralisasi dan memiliki sistem pemerintahan serta standar keuangan yang serupa yaitu negara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina. Pemilihan sampel menggunakan metode *judgement sampling*. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang didapat dari berbagai situs resmi institusi pemerintah daerah. Sampel

dalam penelitian ini adalah provinsi yang memiliki informasi lengkap yang diperlukan dalam melakukan analisis data, pada laporan keuangan pemerintah daerah realisasi dari tahun 2015 sampai 2016. Dalam penelitian ini menggunakan 4 negara dengan total 18 provinsi dikarenakan keterbatasan dalam melakukan akses ke situs resmi masing-masing pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, tidak semua provinsi pada negara-negara di Asia Tenggara mempublikasikan laporan keuangan daerahnya secara terbuka. Kinerja Keuangan masing-masing negara Asia Tenggara akan diuji dengan menggunakan ANOVA untuk setiap rasio yang diukur dan sebelumnya dilakukan uji homogenitas data. Pada Tabel 1 disajikan Negara dan Provinsi yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 1. Negara-Negara Asia Tenggara dan Provinsi yang Mempublikasikan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2016

No.	Negara	Provinsi
1	Filipina	Bukidnon
2	Malaysia	Negeri Johor
		Negeri Pahang
		Negeri Kelantan
		Negeri Sabah
3	Thailand	Nong Khai
		Nakhon Phanom
		Jawa Barat
		Jawa Tengah
4	Indonesia	Aceh
		Bali
		Nusa Tenggara Barat
		Sulawesi Barat
		Kalimantan Timur
		Banten
		Maluku
		Kalimantan Barat

### Definisi Operasional Variabel Penelitian

Analisis keuangan pemerintah daerah bisa diukur dengan menggunakan analisis rasio untuk menilai kinerja suatu pemerintah daerah berdasarkan berbagai elemen yang tersedia dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat

berbagai rasio yang bisa digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah, akan tetapi terdapat beberapa rasio yang diutamakan untuk menunjukkan aktivitas layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikut ini adalah rasio yang digunakan sebagai tinjauan dari penelitian ini sekaligus pengukurannya.

### Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah (Mahmudi, 2010: 166). Rasio ini dinilai dengan cara menilai dana yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang mampu direalisasikan. Semakin kecil nilai perbandingan ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah. Rasio efisiensi dihitung dengan formula:

$$\text{Ratio Efisiensi} = \frac{\text{Total Biaya}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$$

### Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total pendapatan asli daerah (PAD) (Mahmudi, 2016:143). Kontribusi pendapatan daerah dapat diukur dengan formula rasio sebagai berikut:

$$\text{Ratio Kontribusi PAD} = \frac{\text{Penerimaan Perusahaan Da}}{\text{Penerimaan Pendapatan Da}}$$

### Kemampuan Hutang terhadap Pendapatan

Rasio hutang terhadap pendapatan daerah sangat bermanfaat bagi pihak eksternal terutama calon pemberi pinjaman untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman (Mahmudi, 2010). Rasio ini dapat diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Ratio Hutang Terhadap Pendapatan} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Pendapa}}$$

### Kemampuan Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja menunjukkan perbedaan antara total realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah. Menurut rasio ini, para pihak yang menggunakan laporan keuangan daerah dapat mengerti alokasi belanja daerah yang diperuntukan bagi investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Tidak sama dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang (Karinda, et al., 2013). Rasio kemampuan belanja modal terhadap total belanja dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Ratio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja M}}{\text{Total Belanja}}$$

### Kemampuan Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Analisis rasio belanja langsung menunjukkan jumlah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas) pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik sebagai output dari aktivitas tersebut (Mutiha, 2016). Kemampuan belanja langsung terhadap total belanja dihitung dengan menggunakan rasio berikut ini:

$$\text{Ratio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja}}{\text{Total Belanja}}$$

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah seluruh provinsi di Indonesia, Filipina, Thailand dan Malaysia adalah 18 pemerintah daerah setara provinsi. Filipina terdapat 1 provinsi, Indonesia terdapat 10 provinsi, Thailand terdapat 2 provinsi, dan Malaysia terdapat 5 provinsi. Penelitian ini menggunakan periode 2 tahun anggaran (dari tahun 2015 hingga 2016) sebagai pool data. Hasil dari pengujian data disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis

Keterangan	Efisiensi	Kontribusi PAD	Kemampuan Hutang Terhadap Pendapatan	Kemampuan Belanja Modal Terhadap Total Belanja	Kemampuan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja
Uji Homogenitas (Tukey HSD)	0,899	0,908	0,624	0,855	0,723
Signifikansi	0,575	0,024	0,051	0,056	0,000

Uji Hipotesis (ANOVA)	0,635	3,608	2,889	2,184	26,633
	<b>H<sub>01</sub> diterima</b>	<b>H<sub>02</sub> ditolak</b>	<b>H<sub>03</sub> diterima</b>	<b>H<sub>04</sub> diterima</b>	<b>H<sub>05</sub> ditolak</b>

Sumber: data diolah, 2019

Hasil uji homogenitas menunjukkan nilai signifikansi melebihi 0,05 menggunakan *Tukey HSD test*. Oleh karena itu untuk selanjutnya data rasio dalam penelitian ini memenuhi syarat untuk diuji dengan ANOVA. Hasil pengujian efisiensi pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan nilai F sebesar 0,635 dengan tingkat signifikansi 0,575 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara ditinjau dari kemampuan efisiensi. Apabila diuji lebih lanjut dengan *Post Hoc Test* dengan *Bonferroni Test* maka dapat diketahui bahwa untuk rasio efisiensi diantara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Mahmudi (2010) dan Setyaningsih (2012), sehingga dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara mengelola belanja daerahnya sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerahnya.

Hasil pengujian kontribusi pendapatan asli daerah pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan nilai F sebesar 3,608 dengan tingkat signifikansi 0,024 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara ditinjau dari kontribusi pendapatan asli daerah. Apabila diuji lebih lanjut dengan *Post Hoc Test* dengan *Bonferroni Test* maka dapat diketahui bahwa untuk rasio kontribusi pendapatan asli daerah diantara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, terdapat kemungkinan bahwa kemampuan setiap pemerintah daerah menggali potensi riil untuk dijadikan pendapatan asli daerah berbeda-beda di setiap negara bergantung pada karakteristik dan keunikan setiap negara.

Hasil pengujian kemampuan hutang terhadap pendapatan pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan nilai F sebesar 2,889 dengan tingkat signifikansi 0,051

lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara ditinjau dari kemampuan hutang terhadap pendapatan. Apabila diuji lebih lanjut dengan *Post Hoc Test* dengan *Bonferroni Test* maka dapat diketahui bahwa untuk rasio kemampuan hutang terhadap pendapatan diantara Indonesia, Malaysia dan Filipina tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan perbedaan terjadi antara Indonesia dengan Thailand dengan nilai signifikansi 0,035. Hutang Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan Thailand dengan jumlah hutang Indonesia yang lebih besar. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Mahmudi (2010) bahwa kemampuan membayar hutang menjadi tolak ukur bagi para pemberi pinjaman, sehingga jumlah hutang yang besar apabila disertai dengan keinginan untuk terus melunasi kewajiban tersebut akan menunjukkan tanggungjawab pemerintah daerah.

Hasil pengujian kemampuan belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan nilai F sebesar 2,184 dengan tingkat signifikansi 0,056 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara ditinjau dari kemampuan belanja modal terhadap total belanja. Apabila diuji lebih lanjut dengan *Post Hoc Test* dengan *Bonferroni Test* maka dapat diketahui bahwa untuk rasio belanja modal terhadap total belanja diantara Indonesia, Malaysia dan Filipina tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan perbedaan terjadi antara Thailand dengan Malaysia dengan nilai signifikansi 0,037. Thailand dan Malaysia lebih mengarahkan pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal. Kedua negara tersebut mempersiapkan infrastruktur yang kuat untuk memberikan layanan

publik dan Thailand menunjukkan proporsi yang lebih besar dalam belanja modal. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Mahmudi (2010) bahwa proporsi belanja modal yang besar menunjukkan pemerintah daerah cenderung berorientasi terhadap penyiapan infrastruktur daerah pada periode anggaran yang bersangkutan.

Hasil pengujian kontribusi pendapatan asli daerah pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan nilai F sebesar 26,633 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara ditinjau dari kemampuan belanja langsung terhadap total belanja. Apabila diuji lebih lanjut dengan *Post Hoc Test* dengan *Bonferroni Test* maka dapat diketahui bahwa untuk rasio kemampuan belanja langsung terhadap total belanja diantara Indonesia, Malaysia dan Thailand tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan perbedaan yang terjadi adalah antara Indonesia dengan Filipina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah di negara-negara Asia Tenggara sudah mengalokasikan belanja langsung untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam rangka pemberian layanan publik (Mahmudi, 2010), akan tetapi jumlah yang berbeda terjadi dikarenakan jumlah provinsi yang ada dalam setiap negara berbeda-beda, terutama Indonesia yang memiliki jumlah provinsi terbanyak.

## SIMPULAN

Menurut hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di negara-negara Asia Tenggara ditinjau dari kemampuan efisiensi, kemampuan hutang terhadap pendapatan dan kemampuan belanja modal terhadap total belanja, meskipun terdapat perbedaan pada kemampuan kontribusi pendapatan asli daerah dan belanja langsung terhadap total belanja. Penelitian ini memberikan dukungan terhadap pernyataan Mahmudi (2010) dan beberapa penelitian lain yang cenderung

menggunakan penelitian untuk pemerintah daerah suatu negara tertentu.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu pertama, terbatasnya jumlah data pada tahun anggaran yang sama diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara; kedua, masih terdapat beberapa rasio yang bisa diapakai untuk menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan membandingkan kondisi pengelolaan pemerintah daerah secara keseluruhan dengan melakukan tinjauan terhadap anggaran keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan tinjauan terhadap anggaran maupun realisasi laporan keuangan pemerintah daerah pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. *"Akuntansi Sektor Publik: Pengantar"*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, I. 2010. *"Akuntansi Sektor Publik: Pengantar"*, Edisi ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *"Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah"*. Yogyakarta: Andi.
- Halim, A. dan Kusufi, M.S. 2012. *"Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah"*, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukmadilaga, C., Pratama, A., dan Mulyani, S. 2015. "Good Governance Implementation In Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries". *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211(2015): 513 – 518.
- Ritonga, I.T., Clark, C. dan Wickremasinghe, G. 2012. "Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration". *Public and Municipal Finance*, Vol. 1(2): 37-50. ISSN: 2222-1867.
- Poyoh, C.M., Murni, S. dan Tulung, J.E. *"Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon"*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi*,

- Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 5(2): 745-752. ISSN 2303-1174.
- Mahmudi. 2010. “*Manajemen Keuangan Daerah*”. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmud, M., Kawung, G. Dan Rompas, W. 2014. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 14(2): 1-13.
- Fitra, H. 2015. “Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Untuk Mengoptimalkan Manajemen Pendapatan Daerah”. *Jurnal WRA*, Vol 3(2).
- Karinda, C.Y., Ilat, V.I. dan Mawikere, L.M. 2013. “Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal Accountability*, Vol. 2(2).
- Mutiha, A.M. 2016. “The Effect of Financial Ratios to Human Development Index: Based on Study in Districts and Cities of West Java”. *Proceeding 1st International Conference of Higher Vocational Education*, Universitas Indonesia.